

**AGAMA, SEGREGASI EKONOMI, DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT JAYAPURA PAPUA**

Idrus al Hamid

e-mail: idrus@iainpapua.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Jayapura, Indonesia

Abstract:

Regional expansion in Papua is an interesting phenomenon, because there is an attraction between the central government and the Papuan. The pretext of the development and empowerment of Papua, both from the aspect of natural resources and human resources is the reason that made the Presidential Instruction in 2003 published for the acceleration of development in Papua. The pros and cons occurred, because the Papuans do not want the expansion at that time, until four victims have to fall. Inequality occurred because natural resources in Papua are explored more by non-Papuans. Friction between OAP (Papuan Genuine) and ONP (Non-Papuan) has occurred since the 1960s to the present. But later OAP began to understand the pattern of changing times and preparedness in the face of the globalization era, especially the readiness to face an increasingly developing economy. The friction that occurred due to different culture and history in the economic dynamics between OAP and ONP becomes a meeting point, so that between OAP and ONP now can be established mutual symbiosis, both have their own bargaining value

Keywords: *Regional Expansion, OAP and ONP, Economy, Mutual Symbiosis*

Introduction

Diskursus tentang pribumi dan non pribumi begitu kencang saat pilkada Jakarta 2017 lalu. Namun dalam segmen yang berbeda, terma yang digunakan adalah penduduk local dan pendatang. Urbanisasi, migrasi, transmigrasi adalah beberapa contoh upaya untuk mencari kehidupan yang lebih baik dari sisi ekonomi. Perpindahan dari desa ke kota, dari kota kecil ke ibu kota provinsi maupun negara, hampir kesemuanya memiliki motif ekonomi yang melatarbelakangi perpindahan tersebut. Sayangnya, Jakarta selalu disorot sebagai kota impian banyak orang Indonesia dalam mengadu nasib perekonomian. Faktanya, banyak ibu kota provinsi lain yang memiliki permasalahan terkait dengan penduduk local dan pendatang, utamanya dengan permasalahan ekonomi.

Hanya saja, penyebutan penduduk lokal dengan pendatang terbilang begitu sempit. Perpindahan berdasarkan lokasi saja, sudah bisa disebut sebagai pendatang. Di suatu daerah, perpindahan dari satu desa ke desa yang lain pun sudah disebut sebagai pendatang untuk menyebutkan cakupan penduduk pendatang dalam skala yang begitu kecil. Permasalahan penduduk local dan pendatang tidak terpaku pada permasalahan ekonomi sebagai permasalahan utama, bisa saja atribusi-atribusi lain turut serta menjadi titik gesekan antara penduduk local dan pendatang. Seringnya, pemicu gesekan-gesekan ini adalah hal yang remeh temeh, namun menjadi besar ketika atribusi-atribusi lain yang ditonjolkan sebagai pemicu gesekan tersebut, padahal pemicunya bukanlah atribusi-atribusi tersebut.

Berbicara jawa, sebagian sumatera, bali, merupakan daerah-daerah yang terkenal keras dan dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni untung berjuang. Di daerah-daerah tersebut, yang kuat yang bertahan, sebab masing-masing individu membekali diri dengan keahlian-

keahlian tertentu untuk siap bersaing. Selain kemampuan individual, kekuatan mayoritas dan minoritas menjadi salah satu factor yang mendukung keberhasilan individu dalam melakukan perjuangan ekonominya. Fakta ini juga diperkuat dengan adanya paguyuban ataupun perkumpulan atas nama suatu daerah ataupun suku di pelbagai daerah di Indonesia.

Berkenaan dengan penduduk pendatang, Indonesia memiliki beberapa suku yang terkenal memiliki tradisi untuk merantau. Enam suku yang memiliki tradisi kuat tersebut adalah Minangkabau, Bugis-Makassar, Banjar, Bawean, Batak dan Madura. Bentuk ciri khas ataupun stereotip yang melekat dari suku-suku tersebut adalah Rumah Makan Padang, Coto Makassar, Sate Madura, Soto Banjar, profesi pengacara serta beberapa ciri khas kedaerahan yang bisa ditemui di kota-kota di Indonesia. Bahkan, terdapat statemen yang menyatakan; jika dunia memiliki cina, maka Indonesia memiliki minang dalam hal perantauan.

Hal yang menarik dari diskursus penduduk local dan pendatang adalah ketika penduduk pendatang menjadi penduduk mayoritas di suatu daerah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah penduduk local tidak mampu bersaing dengan penduduk pendatang, sehingga populasi mereka kalah dibanding dengan penduduk pendatang. Perlu ditelusuri lebih jauh factor-faktor apa saja yang membuat fenomena tersebut terjadi, khususnya pada aspek perekonomian yang dalam rentang empat tahun kebelakang pembangunan infrastruktur di Papua tengah mendapat perhatian lebih.

Tema penduduk pendatang dan penduduk local juga terkait dengan terjadinya pemekaran wilayah, khususnya di daerah timur Indonesia. Semangat pemekaran wilayah sebenarnya adalah desentralisasi, agar daerah mampu mengatur dirinya sendiri sesuai dengan otonomi daerah dan otonomi khusus yang telah diberikan. Setidaknya terdapat dua alasan

mengapa pemekaran wilayah diperlukan dengan tujuan desentralisasi. Pertama, hampir keseluruhan yang terjadi, baik dari pemberitaan ekonomi, social, politik dan aspek lainnya selalu Jakarta-sentris, sementara pembangunan di daerah lain Nampak sebagai 'objek perahan' saja. Kedua, daerah-daerah dengan potensi alam yang begitu besar tidak mendapatkan dampak yang signifikan akan hasil bumi yang dimiliki. Sayangnya, beberapa daerah yang tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai, menggunakan tenaga penduduk pendatang untuk melakukan eksplorasi dan pengolahan hasil bumi tersebut, penduduk asli seakan tersingkirkan dengan kedatangan mereka.¹

Demikian halnya yang terjadi di Papua, pemekaran wilayah menuntut adanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengeksplorasi dan mendayagunakan sumber daya alam secara maksimal. Papua selama ini mendapati stereotip sebagai daerah dengan segudang ketertinggalan, namun juga menjadi korban eksploitasi alam. Aloysius Gunadi Brata juga menyatakan bahwa pemekaran wilayah di Papua tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebab pemekaran terjadi hanya menguntungkan kelompok tertentu saja, sehingga penolakan terus terjadi.² Namun berdasarkan waktu yang berjalan, pembangunan di Papua terus berlanjut sampai saat ini bahkan mendapat sorotan tersendiri, terlepas perseptif yang digunakan dalam melihat pembangunan berkelanjutan tersebut.

¹ Andik Wahyun Muqoyyidin, *Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan*, Jurnal Konstitusi X (II) 2013, hlm.287-309

² Aloysius Gunadi Brata, *Pemekaran Daerah di Papua: Kesejahteraan Masyarakat vs. Kepentingan Elit*, Simposium Nasional Riset dan Kebijakan Ekonomi: "Dampak Bencana Alam dan Lingkungan Terhadap Pengelolaan Ekonomi Indonesia", Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, 20-21 Agustus 2008.

Papua dalam Sejarah dan Angka

Irian Jaya merupakan nama yang melekat lama untuk dua provinsi di pulau berbentuk burung tersebut, sebelum terjadinya pemekaran menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Proses pemekaran di bumi cenderawasih ini berbeda dengan proses pemekaran yang terjadi di beberapa daerah lainnya. Daerah lain meminta - dengan menggunakan istilah lain, mendemo - ke pemerintah induk maupun pusat untuk memekarkan suatu daerah menjadi daerah baru.³ Kengototan yang terjadi di berbagai daerah dibuat oleh orang-orang daerah yang meminta untuk dimekarkan, sedang kasus di Papua, pemerintah pada saat itu merupakan sosok yang paling ngotot dalam pemekaran Papua. UU No. 45 Tahun 1999 diterbitkan pemerintah perihal pemekaran Papua, namun hal itu ditolak oleh masyarakat Papua. UU tersebut dihidupkan kembali dengan Inpres No.1 Tahun 2003, yang isinya adalah instruksi percepatan pemekaran Papua yang terbagi menjadi tiga daerah, Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Timur. Instruksi ini dirasa tidak tepat, sebab sesuai dengan UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, segala sesuatu yang terkait dengan Papua harus dimusyawarahkan melalui Majelis Rakyat Papua (MRP). Walhasil, sebagian besar rakyat Papua saat itu menolak ide pemekaran tersebut.

Pemekaran ini memang membagi rakyat Papua menjadi dua pihak, pro dan kontra. Berbagai pertimbangan untuk segera diwujudkannya pemekaran Papua juga tertuang pada UU No.45 Tahun 1999 tersebut. Beberapa diantaranya adalah pertumbuhan penduduk, potensi ekonomi, serta peningkatan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Berdasarkan Dekrit Presiden No.327 Tahun 1999 tertanggal 12 Oktober 1999, BJ Habibie sebagai presiden saat itu mengangkat Herman Monim,

³ Lili Romli, *Pro-Kontra Pemekaran Papua: Sebuah Pelajaran Bagi Pemerintah Pusat*, Jurnal Penelitian Politik, III (1) 2006, hlm.25-41

wakil gubernur Irian Jaya saat itu, menjadi Gubernur Irian Jaya Tengah dan Bram Atururi menjadi Gubernur Irian Jaya Barat. Dekrit ini ditolak oleh DPRD Irian Jaya melalui SK No. 11/DPRD/1999 tanggal 16 Oktober 1999 berdasarkan desakan masyarakat Irian Jaya. Pada prosesnya, pemekaran Irian Jaya tetap dilakukan dengan membentuk Irian Jaya Barat yang dideklarasikan pada 6 Februari 2003 dan berlangsung secara aman dan damai. Berbeda dengan deklarasi Irian Jaya Tengah, terjadi bentrok antara kubu pro dan kontra dan menewaskan empat orang, dua orang dari masing-masing pihak.

JRG Djopari, salah seorang tokoh yang pro terhadap pemekaran wilayah di Papua, berpendapat bahwa pemekaran wilayah tersebut setidaknya memiliki enam aspek positif.⁴ Pertama, aspek pemerintahan yang akan lebih mampu terakomodasi dan dikendalikan dengan baik mengingat wilayah Papua sebelum terjadi pemekaran memiliki luas empat kali Pulau Jawa. Kedua, aspek politik yang memungkinkan tiga putera terbaik Papua dapat muncul menjadi gubernur. Selain itu, aspek ini juga mampu mereduksi ruang lingkup gerak partai politik menjadi lebih mudah dalam melakukan sosialisasi. Ketiga, aspek hukum yang berdampak pada keputusan DPRD Irian Jaya No.11 Tahun 1999 yang menolak pemekaran wilayah di Papua, tidak bisa membatalkan UU No.45 Tahun 1999, sehingga Inpres No.1 Tahun 2003 menjadi benar adanya tentang percepatan pemekaran wilayah di Papua.

Keempat, aspek ekonomi yang dimiliki ketiga daerah yang direncanakan akan mendapat pemekaran. Irian Jaya Barat memiliki Pertamina dan Proyek Tangguh BP, Irian Jaya Tengah memiliki PT Freeport, dan Irian Jaya Timur memiliki tambang emas dan tembaga di Oksibil pada PT Inggold dan minyak di Kouh, Tanah Merah pada PT

⁴ JRG Djopari, *Pemekaran Papua Positif Bagi Rakyat Papua*, dalam Lili Romli, *Pro-Kontra Papua: Sebuah Pelajaran Bagi Pemerintah Pusat...*hlm.25-41

Connoco. Kelima, aspek social budaya yang akan berkembang dan dikembangkan secara efektif, hubungan dengan pemerintahan yang lebih dekat, sarana dan prasarana Pendidikan dan keagamaan yang lebih memadai, serta bantuan-bantuan social yang dapat didistribusikan dengan cepat dan lebih efektif. Keenam, aspek pertahanan dan keamanan yang tidak membutuhkan Polda maupun Kodam baru, sebab kedua Lembaga yang sudah ada tersebut dirasa cukup untuk menangani permasalahan keamanan dan pertahanan di wilayah Papua.

Jika pihak pro membeberkan alasan-alasan mengapa pemekaran wilayah merupakan sesuatu yang positif bagi Papua, maka pihak kontra berpedoman bahwa pemekaran dilakukan tidak dalam koridor otonomi khusus berdasarkan UU No.21 Tahun 2001. Pemekaran ini dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat, bahkan pemekaran ini dinilai merupakan kepentingan elit pusat yang ingin mengontrol Papua dengan lebih mudah. Pemekaran ini juga dinilai sebagai upaya preventif pemerintah dari gerakan OPM. Selain itu, proses pemekaran ini masyarakat tidak dilibatkan dan menimbulkan kesan mereka tidak diperhatikan pemerintah, berujung pada anggapan pemekaran wilayah hanyalah untuk memecah belah rakyat Papua.

Alasan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak tentu berangkat dari pemikiran yang berbeda. Pihak pro menganggap perlunya pemekaran untuk jangka Panjang perkembangan Papua. Adapaun pihak kontra, berangkat dari nilai-nilai kearifan local yang ingin mendapat perhatian dan keterlibatan langsung akan setiap permasalahan kenegaraan yang menyangkut Papua. Pihak pro ingin sesuatu yang progresif, jauh kedepan, namun pihak kontra masih berkuat pada tataran normatif. Perbedaan pijakan awal dari kedua belah pihak ini tentu perlu dipertemukan untuk mendapatkan solusi terbaik perihal pemekaran wilayah tersebut. Dalam prosesnya, pembagian Papua menjadi tiga

provinsi tidak berjalan seperti yang tertuang dalam Inpres Tahun 2003 tersebut. Saat ini, Papua hanya terbagi menjadi dua provinsi, Papua Barat dan Papua.

Dibalik pro kontra yang terjadi ketika pemekaran wilayah digaungkan di Papua, perlu dilihat sisi positif yang telah berkembang semenjak pemekaran wilayah tersebut dideklarasikan. Data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan sempat mengalami fluktuasi dalam satu dekade kebelakang. Namun dalam rentang waktu dua tahun terakhir, terdapat kecenderungan penurunan angka kemiskinan di Papua. Fakta ini memang tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator capaian keberhasilan pemekaran wilayah, namun bisa menjadi salah satu indikator positif dari pemekaran wilayah tersebut.

Pembangunan di Papua juga terus digalakkan. Tidak hanya pada sector infrastruktur, sector pertanian pun sempat disentuh. Sayangnya, terdapat kebijakan yang menurut orang Papua tidak memperhatikan kearifan local penduduk asli Papua. Pada tahun 2015, Presiden Jokowi sempat meresmikan 43.000 hektar sawah di Merauke. Menurut Pdt Dorman Wadikmbo, masyarakat asli Papua tidak membutuhkan persawahan. Orang Papua lebih membutuhkan perkebunan seperti sagu atau ubi jalar. Menurutnya, peresmian ini hanya menguntungkan pihak transmigran saja.

Pdt Dorman Wadikmbo juga menuturkan hal tersebut - peresmian sawah - sama halnya dengan peresmian Pasar Mama. Fakta di lapangan mengungkapkan bahwa orang asli Papua sulit memiliki lapak di pasar tersebut. Pengajuan kredit oleh orang Papua sulit, berbeda dengan transmigran yang mudah mengajukan kredit. Berbagai sector di Papua

masih didominasi oleh penduduk non Papua sebagai pekerjanya, yang dinilai tidak menguntungkan untuk penduduk asli Papua.⁵

Pembangunan Papua: Untuk Siapa?

Mengingat sedikit tentang proses pemekaran wilayah yang terjadi di Irian Jaya saat itu, pro kontra mengiringi selama proses berlangsung sampai harus menelan korban jiwa dari kedua belah pihak. Otonomi khusus yang diberikan kepada Papua juga terasa sia-sia saja, sebab bagi pihak kontra, mereka tidak dilibatkan dalam perumusan pemekaran wilayah tersebut. Hal ini ditambah dengan terbitnya Inpres Tahun 2003 yang seakan menjadi bukti riil bahwa pemekaran wilayah di Papua bukanlah keinginan masyarakat Papua, melainkan kepentingan pemerintah pusat.

Pembangunan Papua tidak hanya digalakkan pada era pemerintahan presiden Joko Widodo. Semenjak terbitnya Inpres Tahun 2003 tersebut, maka sejak itu pula pembangunan di Papua sudah dimulai. Hanya saja, pembangunan di Papua terbilang sangat lambat karena posisinya yang sangat jauh dari pusat pemerintahan pusat. Ketimpangan-ketimpangan yang ada di Papua dengan daerah lain juga menjadi indikator bagaimana Papua, yang selama ini menjadi representasi Indonesia Timur, merupakan daerah yang menurut orang-orang pusat perlu dikembangkan.

Semangat pembangunan adalah untuk memudahkan, memberikan akses kepada siapapun untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan tentu layanan yang lebih baik. Infrastruktur yang terus disebut pengerjaannya, birokrasi yang semakin mudah dengan akses satu pintu, begitu terasa manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat yang mana? Tentu ini juga perlu diperjelas. Pemerataan pembangunan memang sudah

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150522191924-20-55128/tokoh-Papua-menilai-pembangunan-hanya-untungan-pendatang>

dimulai sejak Soeharto menjadi presiden, namun isu pemerataan pembangunan ini menjadi perbincangan yang tidak pernah menemukan ujungnya ketika SBY menjabat dua periode hingga saat Jokowi memimpin Indonesia.

Terdapat empat belas prinsip tata kelola pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan, yakni 1) visioner, 2) keterbukaan dan transparansi, 3) partisipasi masyarakat, 4) akuntabilitas 5) supremasi hukum 6) demokrasi 7) profesionalisme dan kompetensi 8) daya tanggap 9) efisiensi dan efektifitas 10) desentralisasi 11) kemitraan dengan swasta dan masyarakat 12) komitmen pada pengurangan kesenjangan 13) komitmen pada pasar yang fair, dan 14) komitmen pada lingkungan hidup. Prinsip tata kelola pemerintahan tersebut diharapkan mampu menjadikan pemerintahan yang bersih, melindungi minoritas, dan mendengar aspirasi masyarakat.⁶

Berdasarkan laporan dari Bappeda Provinsi Papua, pertumbuhan ekonomi di Papua sejak periode tahun 2013-2015 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2013 merupakan tahun tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 8,35%, tahun 2014 turun menjadi 3,81% dan tahun 2015 kembali naik ke angka 7,91%. Adapun angka kemiskinan di Papua pada tahun 2013 sebesar 31,52%, 2014 turun menjadi 27,80% dan 2015 kembali naik menjadi 28,17%.⁷ Melihat data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua sejak tahun 2001-2013, laju pertumbuhan ekonomi cenderung fluktuatif. Perhatikan tabel berikut:

⁶ Muhammad MUSAAD, *Analisis Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota Se Wilayah Papua Tahun 2016*, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, 2016, hlm.2-3

⁷ Muhammad MUSAAD, *Analisis Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota Se Wilayah Papua Tahun 2016*, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, 2016 hlm.17-41

SEKTOR	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	4.21	5.05	6.25	1.31	3.77	4.65	1.34	5.72	5.84	4.38	4.33	18.15	3.74
Pertambangan	5.40	3.39	24.34	26.38	0.10	1.24	3.01	-0.52	-2.73	8.80	1.35	33.43	2.36
Industri	7.15	42.03	2.18	10.16	3.50	7.45	9.80	10.66	4.06	4.63	1.44	2.78	8.74
Listrik, air, bangunan	3.40	2.92	2.58	4.42	2.94	3.35	4.83	5.37	5.58	6.00	6.42	0.26	4.69
Perdagangan	6.39	46.13	4.05	5.63	5.07	6.94	2.36	9.05	11.99	12.20	12.17	11.22	12.50
Pengangkutan	8.06	2.49	6.29	10.14	2.49	3.39	6.19	4.08	5.34	5.46	6.27	0.90	5.19
Jasa perusahaan	4.38	6.35	5.50	9.48	6.20	7.07	6.80	9.24	9.85	10.29	10.48	08.86	8.42
Jasa-jasa	10.43	9.50	6.30	19.74	7.75	18.38	36.06	24.34	6.62	8.04	13.63	4.05	14.49
PDRB	7.18	8.18	14.42	16.57	8.46	10.06	4.69	7.45	12.56	12.61	9.57	12.44	8.09
	7.75	9.84	9.96	11.66	0.39	6.78	7.86	7.60	8.05	8.15	8.78	8.76	9.99

Sumber :BPS provinsi papua, 2014

Arsyad menyatakan bahwa permasalahan pokok dalam pembangunan daerah terletak pada bagaimana kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah terkait dengan menggunakan sumber daya manusia. Tujuan dari pembangunan ini harus mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan yang ditujukan untuk membuka lahan kerja baru serta meningkatkan laju ekonomi daerah tersebut.⁸

Papua sendiri memiliki sector-sektor ekonomi unggulan. Sidik budiono menjelaskan terdapat 13 sektor unggulan (pertumbuhan dan pangsa pasar tinggi) dan 13 sektor pada level Question Mark (pertumbuhan tinggi namun pangsa pasar rendah). Sector-sektor tersebut terkait dengan sumber daya alam yang tersedia dengan sector usaha yang sedang dikembangkan maupun yang masuk dalam kategori unggul. 13 sektor unggulan tersebut adalah kehutanan, angkutan laut, jasa pemerintahan umum, angkutan udara, perikanan, konstruksi, hotel, komunikasi, tanaman bahan makanan, jasa hiburan dan rekreasi, bank, dan angkutan sungai. 13 sektor yang masuk Question Mark adalah

⁸ Olera Weya, Amran T.Naukoko, dan George Manuel Kawung, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah dan PDRB di Provinsi Papua*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, XV (V) 2015, hlm.59-65

Lembaga keuangan non-bank, peternakan, listrik, air bersih, perusahaan, jasa social kemasyarakatan, restoran, jasa perorangan dan rumah tangga, sewa bangunan, penggalian, tanaman perkebunan, dan jasa penunjang angkutan.⁹

Hasil penelitian sidik budiono juga menjelaskan bahwa, sector perkebunan dan peternakan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi sector unggulan, untuk mengembangkannya dibutuhkan investasi yang lebih agar bisa menjadi lebih mandiri. Satu sector lain yang perlu mendapat perhatian adalah sector manufaktur, yang selama ini masih belum bisa bersaing dengan daerah lain di luar Papua. Salah satu penyangga utama terhadap tiga sector tersebut adalah ketersediaan listrik yang masih belum memadai, juga sumber daya manusia yang perlu peningkatan yang signifikan.

Menyetarakan Papua: Mempersiapkan Diri menjadi Lebih Mandiri

Ketimpangan-ketimpangan yang ada di Papua selama ini seakan hanya menjadi isu yang terus menerus dibahas sesuai dengan kepentingan masing-masing. Langkah-langkah konkrit yang ada untuk memberantas ketimpangan yang terjadi hanya dianggap sebagai tindakan yang tidak berdampak. Pemerintah pusat berkoar-koar untuk terus membangun Papua agar setara dengan pemerintahan pusat, baik dari sisi ekonomi, Pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan secara umum. Sayangnya, banyak hal yang tidak memperhatikan kearifan local atau keinginan masyarakat Papua secara umum, khususnya masyarakat asli Papua.

⁹ Sidik Budiono, *Analisis Matriks BCG Perekonomian Papua*, PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI_U) KE-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global. hlm.862-869

Perkembangan zaman, perkembangan teknologi, kebutuhan akan sumber daya manusia yang mumpuni memang tidak bisa terelakkan. Revolusi Industri 4.0 yang kini tengah berkembang pesat memang menuntut manusia memiliki *skill* dan kompetensi yang lebih baik. Revolusi industry ini sedikit banyak mengancam eksistensi manusia, terutama pada usaha-usaha yang memanfaatkan teknologi sebagai kekuatan utamanya. Hal ini bukan berarti menafikan kehadiran manusia, namun justru memancing manusia untuk lebih bisa menguasai teknologi sebagai control terhadap alat-alat yang kian hari kian canggih.

Apakah hal ini bisa dilakukan di bumi cenderawasih? Tentu bukan hal yang tidak mungkin penerapan teknologi tingkat tinggi diterapkan di daerah manapun, hanya saja perlu pertimbangan-pertimbangan, terlebih di Indonesia yang memiliki kearifan local yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Bahwa modernitas adalah ciri khas bangsa yang ingin maju dan bergerak bebas, namun tentu harus memperhatikan batas-batas serta sumber daya yang sangat terbatas.

Elisabeth Lenny Marit menampilkan hasil penelitiannya tentang toponimi badan usaha yang ada di kota jayapura. Terdapat dua model toponimi badan usaha yang ada di kota jayapura sejauh pengamatannya, yang menunjukkan identitas etnis/kedaerahan dan tidak menggunakan identitas etnis/kedaerahan, juga beberapa badan usaha yang menggunakan nama-nama olahragawan, artis, serta nama-nama yang mengidentikan diri dengan nuansa ketimuran (agama dan ras). Sampai dengan tahun 2016, perkembangan ekonomi terkait dengan toponimi di Papua telah menciptakan 297 badan usaha milik OAP dan 275 badan usaha milik ONP. Ada signifikansi yang baik akibat otonomi khusus

sehingga OAP memiliki kesempatan untuk mengembangkan ekonomi di tanah sendiri.¹⁰

Toponimi memiliki *bargaining position* yang tinggi akibat ciri afirmatif, representasi pelaku ekonomi asli Papua, yang membuatnya mampu bersaing dengan pengusaha nasional lainnya. Motif ekonomi yang berkembang di Kota Jayapura terbagi menjadi tujuh model, yakni: (1) pendirian badan usaha oleh Orang Asli Papua dengan toponimi Papua dan dikelola oleh Orang Asli Papua (OAP), (2) pendirian badan usaha oleh Orang Asli Papua (OAP) dengan toponimi Papua dan dikelola oleh Orang Non Papua (ONP), (3) pendirian badan usaha oleh Orang Non Papua (ONP) dengan toponimi Papua dan dikelola oleh Orang Asli Papua (OAP), (4) pendirian badan usaha oleh Orang Non Papua (ONP) dengan toponimi Papua dan dikelola oleh Orang Non Papua (ONP), (5) badan usaha oleh Orang Asli Papua melakukan sistem sub proyek atau kontraktor, (6) badan usaha oleh Orang Asli Papua meminjam “bendera” kepada badan usaha yang sudah berpengalaman, dan (7) badan usaha oleh Orang Asli Papua melobi paket pekerjaan dengan model “calo” proyek dan menjualnya kepada badan usaha oleh Orang Non Papua (NOP). Berdasarkan tujuh model tersebut, dari 571 badan usaha yang tergabung dalam Gapensi Kota Jayapura, terbagi menjadi 330 badan usaha bertoponimi ciri dan identitas Papua, dan (2) 241 badan usaha bertoponimi ciri dan identitas non-Papua.¹¹

¹⁰ Elisabeth Lenny Marit, *Toponimi Badan Usaha di Era Otsus Papua: Analisis Nilai Ekonomi, Sosial-Budaya, dan Politik di Kota Jayapura*, Melanesia: Jurnal Ilmiah Kajian Sastra dan Bahasa, I (II) 2017, hlm.1-14

¹¹ Elisabeth Lenny Marit, *Toponimi Badan Usaha di Era Otsus Papua: Analisis Nilai Ekonomi, Sosial-Budaya, dan Politik di Kota Jayapura*, Melanesia: Jurnal Ilmiah Kajian Sastra dan Bahasa, I (II) 2017, hlm.1-14

Signifikansi OAP dan ONP dalam Pembangunan Ekonomi Papua

Sensus yang dilakukan tahun badan pusat statistic Kota Jayapura pada tahun 2010 menunjukkan angka yang terlihat mencolok terhadap jumlah penduduk asli Papua (OAP) dan penduduk pendatang (ONP). Jumlah penduduk Papua yang mencapai angka 256.705 jiwa didominasi oleh penduduk non-Papua sebesar 65.03% atau 166.932 jiwa, sedangkan penduduk asli Papua hanya 34.97% atau 89.773 jiwa.¹² perihal ini, terdapat dua istilah yang melekat di bumi cenderawasih tersebut, yakni Amber dan Komin. Amber merupakan istilah yang disematkan kepada penduduk pendatang non-Papua, sedangkan Komin merupakan sebutan untuk penduduk asli Papua. Lebih mudahnya, mereka mengidentifikasi Amber sebagai rambut lurus dan Komin sebagai rambut keriting.

Penyebutan Amber awalnya merupakan sebuah penghargaan/penghormatan kepada orang asli Papua terhadap mereka yang sudah mencapai kesuksesan di kota. Istilah Amber asalnya dari Biak, demikian juga istilah Komin. Belakangan, penyebutan Amber dan Komin menjadi sesuatu yang dikotomis. Istilah ini juga digunakan untuk isu-isu krusial, contohnya pada isu politik local. Istilah Amber dan komin telah menjadi sesuatu yang makin populer. Akhmad dalam karyanya Amber dan Komin: Studi Perubahan Ekonomi di Papua (2005) menyebutkan bahwa situasi social di Papua ditandai dengan gejala adversary culture, wacana yang menunjukkan perbedaan etnis, Batasan antara orang Papua dengan penduduk pendatang. Istilah ini sebenarnya sudah ada sejak jaman pascakolonial, sempat menghilang dan kembali mencuat pada

¹² Alfini Baharuddin, B. Hari Wibisono, Budi Prayitno, M. Sani Roychansyah, *Heterogeneity of Amber and Komin in Shaping Settlement Pattern of Jayapura City*, Komunitas: International Journal of Indonesian Society And Culture, VII (II) 2015, hlm.324-332

tahun 1963 ketika perekonomian di Papua sempat didominasi oleh penduduk non-Papua.¹³

Perkembangan ekonomi di Papua sejatinya telah terjadi sejak era colonial belanda. Penduduk asli Papua juga sudah dilibatkan. Hanya saja, perubahan ekonomi hanya menyentuh penduduk Papua kelas atas, pemilik modal dan colonial itu sendiri, sedang penduduk Papua yang pekerjaannya sebagai pemburu binatang di hutan, peramu dan petani lading tidak tersentuh sampai akhirnya Papua mulai terintegrasi dengan Indonesia di tahun 1963. Pendetang memiliki peran yang signifikan terhadap perubahan ekonomi Papua saat itu, meskipun terdapat anggapan miring terhadap pendatang yang saat itu didominasi oleh orang-orang Bugis. Kedatangan orang-orang bugis memperkenalkan salah satu model usaha baru di tanah Papua, yakni berdagang. Model usaha baru ini membuat segmentasi ekonomi penduduk Papua bertambah. Pada masa awal, orang asli Papua kalah, sebab mereka lebih banyak tinggal di daerah pedesaan, berbeda dengan orang Bugis yang memilih tinggal di perkotaan. Akibatnya, orang-orang bugis dengan mudah menguasai perdagangan baik di Kota Jayapura hingga antar kota/kabupaten. Kecurigaan sempat terjadi, namun akhirnya terjadi symbiosis mutualisme diantara penduduk asli dengan penduduk pendatang, contohnya dengan mengajarkan penduduk Papua asli cara bercocok tanam padi, meskipun sering terjadi perselisihan antara penduduk asli dengan penduduk pendatang.¹⁴

Dalam hal perdagangan, penduduk pendatang dikenal lebih giat dan pandai melihat peluang. Modernisasi di pasar dengan membuka

¹³ Tim ekspedisi Tanah Papua, *Ekspedisi Tanah Papua: Laporan Jurnalistik Kompas: Terasing di Pulau Sendiri*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm.263-269. Lihat juga Rudy Badil, "Amber" Lurus dan "Komin" Keriting dalam Mitu M. Prie, *Ini Tong Pu Hidup*, Jakarta: Gramedia, 2012, hlm. xxviii-xxix

¹⁴ Akhmad dan Pujo Semedi, *Amber dan Komin: Studi Perubahan Ekonomi di Papua*, Jurnal Sosiohumanika XVI-B (II) 2003, hlm.229-245

kios/pertokoan di dalam pasar sempit membuat penduduk asli mengalami kecemburuan sosial dengan fasilitas yang dimiliki oleh penduduk pendatang tersebut. Sayangnya, penduduk asli tidak memanfaatkan fasilitas tersebut, mereka memilih menjual kios mereka dan tetap berjualan di emperan kios disekitar pasar. Fenomena ini oleh Johsz Mansoben, putra pertama Papua yang memperoleh gelar doctor antropologi, menyatakan bahwa hal tersebut merupakan akar budaya masyarakat Papua. Mereka sulit menerima pola pasar yang terbagi dalam lingkup kerja yang jelas dan ketat pelaksanaannya. Pola ekonomi penduduk Papua yang terbiasa dengan cara nomaden (berburu, meramu dan berladang yang berpindah-pindah) tidak bisa berjalan dengan system pasar yang terdistribusi dengan jelas, ada yang membuka lading saja, ada yang merawat saja ada yang memanen dan ada yang menjual saja. Pola distribusi tersebut belum mampu diterima dengan baik oleh penduduk asli Papua.¹⁵

Berita baik lainnya, saat ini pelaku UMKM di Kota Jayapura didominasi oleh penduduk asli Papua. Dari sekitar 3000 pelaku UMKM, 2000 orang merupakan pelaku UMKM asli penduduk Papua, 400 orang lainnya penduduk Port Numbay dan 600 lainnya dari penduduk pendatang. Minat penduduk Papua dalam pelaksanaan UMKM direspon sangat tinggi, namun masih memiliki kelemahan dalam manajemen keuangan, meskipun pada tahun 2017 hanya 10 orang yang gagal dari jumlah 2000 pelaku UMKM dari penduduk asli Papua. Robert L.N. Awi, Kadin Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura menjelaskan bahwa beberapa produk UMKM dari penduduk Papua di Kota Jayapura sampai mengirim produk keluar Kota Jayapura.¹⁶

¹⁵ Nasrullah Nara, *Ekspedisi Tanah Papua: Laporan Jurnalistik Kompas: Terasing di Pulau Sendiri*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm.259-263

¹⁶ <https://kabarPapua.co/orang-asli-Papua-mendominasi-umkm-di-kota-jayapura/>

Budaya perekonomian yang ada pada masyarakat Papua memang berbeda jauh dengan budaya perekonomian penduduk pendatang. Pendatang di kota jayapura secara khusus dan di Papua secara umum memandang kenyamanan hidup dan materi yang berlimpah sebagai tujuan perekonomian yang mereka usahakan. Adapun masyarakat asli Papua, menganggap usaha perekonomian seperti mencari ikan, berburu binatang di hutan atau menokok sagu. Perbedaan orientasi dan model perekonomian diantara penduduk pendatang dengan penduduk local seperti menjadi sesuatu yang dianggap ketimpangan, padahal perbedaan tersebut merupakan sesuatu yang sudah mengakar, membudaya sesuai dengan asal mereka masing-masing.

Ditelisik lebih jauh, kehadiran pendatang di bumi cenderawasih bukan berarti ingin menguasai atau mendominasi perekonomian di Papua. Secara tidak langsung, kehadiran pendatang di Papua mampu memicu dan memacu perkembangan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam di Papua yang sangat melimpah dalam berbagai sector. Hal ini juga membuat pemerintah membuat kebijakan untuk memanfaatkan penduduk asli Papua dalam keterlibatannya pada pembangunan Papua dari berbagai aspek, khususnya aspek perekonomian.

Toponimi yang terjadi di Papua, baik dari sector budaya maupun perkonomian jika dipandang secara komprehensif, jutsru membantu penduduk asli Papua bersaing dengan penduduk daerah lain baik dalam skala local maupun nasional. Heterogenitas yang terjadi di Papua membuat segmen-segmen tersendiri dalam bidang perekonomian. Contoh dalam industry makanan, penduduk muslim tentu akan memperhatikan kondisi halal-haram makanan ataupun proses pengolahan makanan tersebut. Contoh seperti ini, bukanlah untuk mendikotomi segmentasi

pelanggan, namun secara tidak langsung justru membuka segmentasi pelanggannya masing-masing.

Alfini Baharudin dkk membagi lokasi pemukiman penduduk di kota jayapura menjadi 5 model lokasi. Pertama, pemukiman penduduk asli Kota Jayapura. Kedua, pemukiman penduduk Papua pendatang. Ketiga, pemukiman penduduk pendatang non-Papua etnis tertentu. Keempat, pemukiman penduduk dengan mata pencaharian sebagai nelayan. Kelima, pemukiman penduduk campuran. Model pemukiman tersebut bukan dibentuk tanpa alasan. Beberapa daerah tetap menjaga daerah mereka sebagai kampung tradisional dengan mengakomodasi modernisasi dengan secukupnya. Kampung Kayu Pulo misalnya, kampung yang terletak di Kepulauan Teluk Humboldt atau nama lainnya Teluk Yos Sudarso, mereka hanya membangun jembatan secara terbatas. Untuk mencapai Kampung Kayu Pulo, mereka harus tetap menggunakan perahu. Pembatasan pembangunan jembatan dengan alasan keamanan dan kenyamanan, sehingga penduduk luar Kampung Kayu Pulo tidak dapat menjangkau daerah tersebut dengan mudah. Maka, heterogenya penduduk yang ada di Kota Jayapura bukan berarti setiap orang bisa berdiam disuatu tempat, namun banyak kearifan local yang harus tetap dijaga, termasuk dari cara mereka dalam melakukan usaha perekonomian.¹⁷

Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura secara khusus dan di Papua secara umum, merupakan perkembangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip sosialisme Marx. Laju pertumbuhan ekonomi yang ada dapat dikontrol dengan baik, secara demokratis, sehingga tidak terjadi dominasi ekonomi oleh pihak-pihak tertentu. Meskipun pada tahun

¹⁷ Alfini Baharuddin, B. Hari Wibisono, Budi Prayitno, M. Sani Roychansyah, *Heterogeneity of Amber and Komin in Shaping Settlement Pattern of Jayapura City*, *Komunitas: International Journal of Indonesian Society And Culture*, VII (II) 2015, hlm.324-332

1960an sempat terjadi dominasi perekonomian oleh penduduk non-Papua, kedepannya pemerintah mampu melakukan edukasi yang baik kepada penduduk asli Papua dalam menghadapi era globalisasi. Hasilnya, pemilik UMKM di kota jayapura kini lebih banyak dimiliki oleh penduduk asli Papua, yang selama ini sector-sektor ekonomi lebih banyak didominasi oleh penduduk non-Papua.

Selain itu, budaya perekonomian yang ada di Papua, ataupun di Kota Jayapura secara khusus, tetap mengacu pada cara-cara mereka dalam melakukan interaksi ekonomi. Tidak semua penduduk asli Papua menolak atau memilah-milah modernisasi yang ada, banyak dari mereka yang mampu menerima modernisasi sebagai sebuah keniscayaan dalam pembangunan di Papua pada khususnya. Meski secara jumlah penduduk masih didominasi oleh penduduk non-Papua, bukan berarti kota jayapura didominasi oleh penduduk non-Papua, mereka memiliki segmentasi masing-masing dalam membangun perekonomian di Kota Jayapura khususnya, dan di Papua secara umum.

Teori sosialisme Marx berhasil diterapkan dengan baik di Kota Jayapura, dimana sinergitas pemerintah dengan pelaku usaha terjalin dengan baik. Pemerintah mampu mengakomodasi kebutuhan penduduk dan juga berhasil memberikan edukasi tentang perkembangan zaman serta bagaimana menghadapi perkembangan tersebut dengan baik. Menginginkan perubahan di Papua dalam skala makro tentu harus melalui kajian-kajian yang lebih mendalam, sebab fakta di lapangan mengatakan tidak semua penduduk Papua asli menginginkan atau siap menghadapi perubahan zaman. Sebagian masyarakat Papua justru menginginkan orisinalitas mereka tetap terjaga sesuai dengan nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah berjalan dengan baik selama ini. Artinya, kesetaraan social yang ada di Papua dan Kota jayapura secara khusus telah diberikan sesuai dengan porsi yang diinginkan oleh penduduk asli

Papua. Keinginan ini juga telah difasilitasi oleh pemerintah sebagai pihak yang diharapkan mampu mengontrol laju perkembangan di bumi cendrawasih.

Kesimpulan

Apa yang terjadi di Papua, Kota Jayapura khususnya, bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Sinergitas yang merupakan roh dari transmigrasi harus dihidupkan kembali. Bahwa penduduk local dan penduduk pendatang yang ada pada suatu daerah nyatanya untuk saling bahu membahu membangun daerah tersebut dari ketertinggalan. Tentu pembangunan yang diharapkan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan local pada daerah tersebut.

Pembangunan yang ada selama ini oleh sebagian penduduk Papua dianggap menguntungkan penduduk pendatang. Sebagian dari mereka menganggap pembangunan di Papua tidak mengindahkan keinginan penduduk asli Papua. Secara perlahan, sebagian penduduk Papua mulai paham arah pembangunan serta kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembangunan di Papua. Bukti mayoritas UMKM di Kota Jayapura dikendalikan oleh penduduk asli Papua merupakan salah satu bentuk penduduk Papua mampu menerima dan mengembangkan perekonomian berbasis modernisasi.

Selain itu, tipologi mata pencaharian serta orientasi ekonomi penduduk asli Papua dengan penduduk non-Papua bukanlah sesuatu yang perlu diperdebatkan. Di Jawa, juga terdapat beberapa suku yang memang tidak menerima modernisasi atau mengakomodasi modernisasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketimpangan yang ada di Papua terjadi karena berbeda cara pandang terhadap pembangunan di Papua. Justru perbedaan ini menjadi salah satu ciri khas bagaimana penduduk Papua merespon pembangunan dan modernisasi yang ada di bumi cendrawasih.

Namun, hal ini bukan berarti penduduk asli Papua antipati dengan modernisasi. Perlahan sumber daya manusia penduduk asli Papua terus ditingkatkan agar mampu bersaing dengan ekonomi global. Potensi alam yang dimiliki bumi cendrawasih sebaiknya dimaksimalkan oleh sumber daya manusia asli Papua sebagai pengelola asli potensi-potensi tersebut. Tentu, jika sumber daya manusia asli Papua belum mampu mengelola sumber daya alam Papua dengan baik, dibutuhkan sinergi dengan sumber daya manusia non-Papua untuk membantu proses pengembangan sumber daya manusia dan tentunya berujung pada pengelolaan sumber daya alam yang potensial secara maksimal.

Akhmad dan Pujo Semedi menjelaskan, kedatangan penduduk non-Papua membuat diversifikasi ekonomi di Papua. Peran orang bugis pada saat itu memang sangat terasa dalam merubah pola ekonomi penduduk Papua. Factor budaya dan historis memang membuat orang Papua tidak mampu bersaing dengan pendatang, sehingga kesan yang ada orang Papua tidak bisa menguasai pasar. Fenomena ini bukan berarti pendatang membuat penduduk asli termarginalkan, ataupun penduduk Papua tersingkirkan oleh keberadaan pendatang, sebab system perekonomian mereka memang berbeda. Meskipun terlihat tradisonalisme versus modernism, namun keduanya memberikan corak tersendiri dalam pertumbuhan ekonomi di Papua. Justru pertemuan Amber dan Komin ini membuat symbiosis mutualisme diantara penduduk asli dan pendatang dengan ruang kerjanya masing-masing.¹⁸

¹⁸ Akhmad dan Pujo Semedi, *Amber dan Komin: Studi Perubahan Ekonomi di Papua*, Jurnal Sosiohumanika XVI-B (II) 2003, hlm.229-245

Daftar Pustaka

- Akhmad dan Pujo Semedi. *Amber dan Komin: Studi Perubahan Ekonomi di Papua*. Jurnal Sosiohumanika XVI-B (II) 2003
- Baharuddin, Alfini, B. Hari Wibisono, Budi Prayitno, M. Sani Roychansyah. *Heterogenity of Amber and Komin in Shaping Settlement Pattern of Jayapura City*. Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture VII (II) 2015
- Budiono, Sidik. *Analisis Matriks BCG Perekonomian Papua*, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi_U) Ke-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global
- Gunadi Brata, Aloysius. *Pemekaran Daerah di Papua: Kesejahteraan Masyarakat vs. Kepentingan Elit*, Simposium Nasional Riset dan Kebijakan Ekonomi: "Dampak Bencana Alam dan Lingkungan Terhadap Pengelolaan Ekonomi Indonesia", Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, 20-21 Agustus 2008.
- Lenny Marit, Elisabeth. *Toponimi Badan Usaha di Era Otsus Papua: Analisis Nilai Ekonomi, Sosial-Budaya, dan Politik di Kota Jayapura*. Melanesia: Jurnal Ilmiah Kajian Sastra dan Bahasa I (II) 2017
- Musaad, Muhammad. *Analisis Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota Se Wilayah Papua Tahun 2016*. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Papua. 2016
- M. Prie, Mitu. *Ini Tong Pu Hidup*, Jakarta: Gramedia. 2012
- Romli, Lili. *Pro-Kontra Pemekaran Papua: Sebuah Pelajaran Bagi Pemerintah Pusat*. Jurnal Penelitian Politik III (I) 2006
- Sumber Internet:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150522191924-20-55128/tokoh-Papua-menilai-pembangunan-hanya-untungan-pendatang>
<https://kabarPapua.co/orang-asli-Papua-mendominasi-umkm-di-kota-jayapura/> diakses pada tanggal 10 Desember 2018
- Tim ekspedisi Tanah Papua. *Ekspedisi Tanah Papua: Laporan Jurnalistik Kompas: Terasing di Pulau Sendiri*, Jakarta: Kompas. 2008
- Wahyun Muqoyyidin, Andik. *Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan*. Jurnal Konstitusi X (II) 2013
- Weya, Olera, Amran T.Naukoko, dan George Manuel Kawung. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah dan PDRB di Provinsi Papua*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi XV (V) 2015